

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Nama : Arif Hardjanto

NIM : D2A002008

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara sikap pelaksana dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan PBB. Adapun hipotesis yang diajukan adalah adanya pengaruh positif antara sikap dan komunikasi secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan implementasi kebijakan PBB. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari George Edward III dengan teori pendukung dari Van Metern dan Horn serta teori Grindle. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *eksplanatory* disertai uji hipotesis. Sample berjumlah 33 responden (1%) dari jumlah keseluruhan wajib pajak 3372. Pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi *Rank Kendall*, *Konkordansi Kendall* dan Koefisiensi Determinasi.

Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikansi antara sikap dan implementasi kebijakan PBB yang diperoleh Z hitung $4,89 > 2,58$ untuk taraf signifikansi 1%. Ada pengaruh positif dan signifikansi antara komunikasi dan implementasi kebijakan PBB yang diperoleh dari perhitungan Z hitung $3,03 > 2,58$ pada taraf signifikansi 1% serta ada pengaruh positif antara sikap dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan PBB dari perhitungan X hitung $85,72 > X$ tabel 55,75, sedangkan pengaruh sikap terhadap implementasi kebijakan PBB sebesar 35,76%. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan PBB sebesar 13,76% dan

besarnya pengaruh sikap dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan sebesar 79,74%.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sikap dan komunikasi mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Gisikdrono. Saran yang diajukan adalah perlu ditingkatkannya kualitas pelaksanaan salah satunya dengan cara petugas harus lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Abstract

The aim of the study is to recognize there is an effect between the attitude and communication ability of the officer on the implementation of PBB policy. As for the raised hypothesis is the existence of positif relation between attitude and communication either separately or together to the implementation of PBB policy. The theory that is used in the study is the implementation theory of George Edward III with support theory by Van Metern and Horn, Grindle theory. The study used type of explanatory research together with hypothesis test. The sample is 33 respondents (1%) from the 3372 taxpayers. The examination of hypothesis used correlation formula of Rank Kendall, Kendall concordance, and coefficient of determination.

The result of the study proved the existence of significant positif relation between attitude and implementation of PBB policy that is obtained Z count $4,89 > 2.58$ to the significant level 1%. There is the positif relation and significant between communication and the implementation of PBB policy obtained Z count $3,03 > 2.58$ in the significant level 1%. Furthermore, there is positif relation between attitude and communication on the implementation of PBB policy from the calculation result of X count $85,72 > X$ table 55.75 . Additionally, the effect of the attitude on the implementation of PBB policy is equal to 35,76% and the mount effect of attitude and communication on the implementation policy is equal to 13,76%.

Based on the study can be recognize that the attitude and communication have a relation with implementation of PBB policy at Kelurahan Gisidrono. The suggestion that can be offered is necessary to improve the quality of implementation and held the PBB counseling periodically, regularly, and continually. In addition, it is more for increase serve to society.

Pendahuluan

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka pemerintah daerah di beri kebebasan untuk mengolah dan memberdayakan daerahnya sendiri, oleh karena itu maka pemerintah daerah dengan kewenangan yang di beri oleh pemerintah pusat tersebut menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya adalah lewat sektor pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemungutan Pajak

bumi dan bangunan didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1994 dimana pengertian PBB adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan dan bersifat langsung dimana wajib pajak tidak bisa memindahkan kewajibannya kepada orang lain.

Realisasi penerimaan PBB pada saat jatuh tempo di kelurahan gisikdrono kecamatan semarang barat belum menunjukkan angka yang optimal atau maksimal. Tahun 2003 (akhir September), realisasi penerimaan Rp 317.024.411 atau hanya 75,28% dari target yang harus terpenuhi dan hanya 2.473 wajib pajak yang melunasi PBB, tahun 2004 realisasi penerimaan Rp 344.259.824 atau hanya 73,05% dari target yang harus dipenuhi, tahun 2005 realisasi penerimaan Rp 413.598.143 atau hanya 74,34% wajib pajak yang membayar, sedangkan tahun 2006 (akhir September) realisasi penerimaan PBB sebanyak Rp 548.869.683 atau hanya 72,56% wajib pajak yang melakukan kewajibannya membayar pajak PBB.

Adapun masalah pokok yang ingin diketahui penulis adalah mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Gisikdrono kecamatan semarang barat. komunikasi yang terjadi antara wajib pajak dengan petugas pajak kurang baik hal ini membuat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak rendah dalam pembayaran pajak. Selain itu juga sikap petugas pemungut PBB masih kurang memuaskan bagi wajib pajak sesuai dengan permasalahan yang ada diatas dan melihat keadaan yang terjadi di lapangan, maka variabel sikap dan variabel komunikasi merupakan factor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan PBB. Sehingga penulis akan membahas permasalahan tersebut dengan judul :

“Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat.”

Tujuan Penelitian Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Mengetahui hubungan variabel sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan PBB.
- b. Mengetahui hubungan variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan PBB.
- c. Mengetahui hubungan antara variabel sikap dan variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan PBB.

Kerangka Teori

A. Implementasi Kebijakan Publik

Penelitian ini mendasarkan pada konsep implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III dimana pengertian implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. dan beberapa teori pendukung yaitu Van Meter dan Horn (1975), dan Merilee S. Grindle (1980)

Teori George C. Edwards III (1980)

Edwards mengemukakan adanya 4 variabel baik langsung / tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu :

- a. Komunikasi

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. (Hartuti Purnaweni, 1991 : 4).

Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat.

b. Disposisi

Disposisi / Sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

c. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten , tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan , implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak , struktur organisasi yang terlalu panjang

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-Tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn, ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik :

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
- d. Karakteristik Tujuan
 - 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
 - 2) Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan hubungan unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
 - 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi.
 - 4) Tingkat komunikasi terbuka.
 - 5) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan
- e. Komunikasi Antar Organisasi
- f. Sikap Pelaksana (Wahab, 1997 : 19)

Teori Merilee S. Grindle (1980)

Implementasi kebijakan menurut Grindle adalah :

- a. Isi Kebijakan (*Policy Content*)

Yaitu apa yang ada dalam kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Isi kebijakan meliputi 6 variabel :

 - 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan.
 - 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
 - 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
 - 5) Sikap pelaksana kebijakan.
 - 6) Sumber daya yang dikerahkan.
- b. Konteks Kebijakan (*Policy Context*)

Yaitu gambaran mengenai bagaimana konteks politik mempengaruhi kebijakan tersebut. Konteks kebijakan ini meliputi 3 variabel, yaitu :

- 1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat..
- 2) Karakteristik lembaga penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.(Wibawa, 1994 : 220)

Sehingga indicator dalam variabel implementasi kebijakan adalah :

1. Tingkat pelaksanaan kebijakan PBB
2. Tingkat pemanfaatan kebijakan PBB.

B. Variabel Sikap (X1)

Sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang, yaitu : komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konasi. (Azwar, 1998 : 17).

1. Komponen Kognitif

Komponen kognitif berupa persepsi, kepercayaan dan stereotype yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Seringkali komponen kognitif ini disamakan dengan pandangan (opini). Dalam komponen kognitif melibatkan proses evaluasi baik membanding-bandingkan, menganalisis atau mendayagunakan pengetahuan yang ada untuk memberikan suatu rangsang.

2. Komponen Afektif

Komponen afektif mengangkat masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan seseorang terhadap suatu objek sikap tertentu. Reaksi emosional yang

merupakan komponen afektif ini banyak ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai dasar bagi obyek yang dimaksud.

3. Komponen Konatif

Komponen konatif atau perilaku dalam sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Asumsi dasar adalah

bahwa kepercayaan dan perasaan mempengaruhi perilaku. Maksudnya bagaimana orang akan berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan terhadap stimulus tersebut.

Pengertian dalam penelitian ini adalah tanggapan dan tindakan masyarakat selaku wajib pajak kepada petugas terhadap implementasi kebijakan yang terbentuk oleh proses kognisi, afeksi dan perilaku. Indikator dalam variabel sikap adalah :

- Komponen kognisi
- Komponen afeksi
- Komponen konatif

C. Variabel Komunikasi (X₂)

Secara terperinci George C Edward III dalam Hartuti Purnaweni (1991 : 4-13) menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang ditandai tiga hal, yaitu :

a. Transmisi

Sebelum seseorang dapat menerapkan kebijakan harus memahami dan menyetujui keputusan yang harus dijalankan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan itu telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan dan harus melalui hierarki birokrasi dan adanya persepsi selektif dan ketidakmampuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan suatu kebijakan.

b. Kejelasan

Perintah kebijakan tidak hanya diterima para pelaksana kebijakan tapi juga harus diterima dengan jelas. Hal ini penting untuk mencegah implementasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Ada beberapa faktor yang menghambat kejelasan komunikasi, yaitu : kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai kebijakan-kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

c. Konsistensi

Perintah kebijakan tidak kontradiktif karena akan mempersulit pelaksana kebijakan. Konsistensi diperlukan untuk berlangsungnya kebijakan secara efektif dan memudahkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Lingkungan organisasi yang baik hubungan antara anggotanya dapat tercipta melalui komunikasi dua arah yang baik pula. Dimana petugas sebagai komunikator harus mampu menyampaikan pesan secara jelas dan terperinci pada masyarakat sasaran sebagai komunikan. Dari komunikasi yang efektif akan tercipta kerjasama yang diharapkan. Komunikasi dalam penelitian ini adalah penyampaian pesan yang mengandung bermacam-macam keterangan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang menimbulkan efek dan kesempatan untuk arus balik yang ditandai oleh transmisi, tingkat kejelasan pesan dan tingkat konsistensi penyampaian pesan. Oleh karena itu indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Transmisi atau penyampaian pesan.
2. Tingkat kejelasan pesan.
3. Tingkat konsistensi penyampaian pesan

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian eksplanatori dimana penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Populasi dan Sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan di kelurahan Gisikdrono kecamatan semarang barat pada tahun 2006 yang berjumlah 3372 orang. Sampel penelitian ini adalah 33 orang/responden dari 3372 wajib pajak atau sebesar 1% dari populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas. Dilakukan secara sistematis dan dilatarbelakangi dengan pemahaman dan pendalaman terhadap masalah yang akan diteliti, wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden, kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disampaikan secara tertulis berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup, juga kombinasi antara pertanyaan terbuka dan tertutup, studi Pustaka yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah teori dan informasi yang erat hubungannya dengan materi peneliti. Hal ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, majalah dan sumber-sumber lainnya.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menguji, mengkategorikan, mentabulasi, ataupun mengkombinasikan kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian.

Analisis data kuantitatif

Yaitu analisis data yang berjumlah besar dan sudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori guna mengetahui kecenderungan antara variabel yang diteliti.

Untuk menguji data kuantitatif dengan skala ordinal yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisa data dengan menggunakan rumus statistik Rank Kendall (Siegel, 1992 : 264).

Hasil Penelitian

Variabel Implementasi Kebijakan (Y)

Dalam variabel implementasi kebijakan PBB ini terdiri dari 9 item pertanyaan yang jawaban dari setiap pertanyaan tersebut berjenjang skor 1 – 4 dengan kategori Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah dan Sangat Rendah. Dengan Interval 2,75.

Selanjutnya disajikan tabel mengenai rekapitulasi penilaian variabel implementasi kebijakan PBB sebagai berikut

Rekapitulasi Data Variabel Implementasi Kebijakan

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1.	Sangat tinggi (ST)	11	33,3
2.	Tinggi (T)	8	24,2
3.	Rendah(R)	11	33,3
4.	Sangat Rendah (SR)	3	9,1
Jumlah		33	100

Sumber : diolah dari tabel III.14

Tabel rekapitulasi implementasi kebijakan di atas memperlihatkan ada sebanyak 11 orang responden (33,3%) wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan PBB yang dilakukan sudah sangat tinggi dan ada 8 orang responden (24,2%) menyatakan tinggi. Adapun yang menyatakan rendah ada sebanyak 11 orang responden (33,3%) dan hanya ada 3 orang responden (9,1%) dari 33 orang responden yang diteliti yang menyatakan sangat rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gisikdrono Semarang Barat tergolong tinggi.

Responden yang menjawab dengan kategori sangat tinggi dan tinggi terlihat sangat mendukung dengan kebijakan PBB. Mereka merasa adanya PBB bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat sehingga Responden mematuhi untuk membayar PBB tepat waktu,. Untuk responden yang menjawab dengan kategori kurang tinggi atau rendah terlihat kurang mendukung kebijakan PBB. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa wajib pajak yang belum taat melakukan pembayaran pajak karena merasa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat apa-apa kepada mereka.

Variabel Sikap (X_1)

Dalam variabel sikap ini terdiri dari 12 item pertanyaan yang jawaban dari setiap pertanyaan tersebut mempunyai skor berjenjang 1 – 4 dengan kategori Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah dan Sangat Rendah, sedangkan Interval = 4,50.

Selanjutnya disajikan tabel mengenai rekapitulasi penilaian variabel sikap, sebagai berikut

Rekapitulasi Data Variabel Sikap

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1.	Sangat Tinggi (ST)	3	9,1
2.	Tinggi (T)	11	33,3
3.	Rendah (R)	15	45,5
4.	Sangat Rendah (SR)	4	12,1
Jumlah		33	100

Sumber : diolah dari Tabel III.28

Data tabel rekapitulasi variabel sikap di atas, terdapat 3 responden (9,1%) masyarakat wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat yang menyatakan bahwa sikap para petugas pelaksana pemungutan PBB sudah sangat tinggi, ada 11 orang responden (33,3%) menyatakan tinggi, 15 orang responden (45,5%) menyatakan rendah, dan 4 orang responden (12,1%) yang menyatakan sangat rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap para petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat masih dapat dikatakan rendah, sehingga masih perlu banyak mendapat pembenahan.

Responden yang menyatakan bahwa sikap petugas sangat tinggi dan tinggi adalah karena sikap petugas dalam bekerja sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Responden yang menjawab dengan kategori rendah dan sangat rendah adalah bahwa sikap petugas yang kurang menghargai waktu, hal ini dapat dilihat dari petugas yang sering pergi keluar kantor pada saat jam kerja dan pulang lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan sehingga wajib pajak merasa kurang terlayani.

Variabel Komunikasi (X₂)

Dalam variabel komunikasi ini terdiri dari 6 item pertanyaan dan jawaban dari setiap pertanyaan berjenjang skor 1 – 4 dengan kategori Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah dan Sangat Rendah. Sedangkan Intervalnya adalah= 2,75

Selanjutnya disajikan tabel mengenai rekapitulasi penilaian variabel komunikasi, sebagai berikut

Rekapitulasi Data Variabel Komunikasi

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1.	Sangat Tinggi (ST)	13	39,4
2.	Tinggi (T)	8	24,2
3.	Rendah (R)	9	27,3
4.	Sangat Rendah (SR)	3	9,1
Jumlah		33	100

Sumber : diolah dari tabel III.36

Sesuai dengan data tabel rekapitulasi variabel komunikasi di atas, terdapat 13 orang responden (39,4%) dari masyarakat wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat yang menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh petugas selama menjalankan tugasnya sudah sangat tinggi, sedangkan yang menyatakan tinggi ada 8 orang responden (24,2%). Adapun responden yang menyatakan bahwa tingkat komunikasi yang dilakukan petugas pelaksana kebijakan PBB rendah ada 9 orang responden atau sekitar 27,3% dan yang menyatakan tingkat komunikasinya sangat rendah ada 3 orang responden (9,1%). Untuk responden yang menjawab dengan sangat tinggi dan tinggi beranggapan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh petugas terkesan baik dan bisa diterima oleh wajib pajak, seperti bahasa yang digunakan, bentuk dan metode serta informasi yang disampaikan oleh petugas sudah tepat sehingga dapat di mengerti oleh masyarakat, sedangkan untuk responden yang menjawab rendah beranggapan bahwa intensitas

pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kurang sehingga responden menjadi kurang paham mengenai pentingnya PBB.

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel sikap dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Pengujian ini menggunakan alat uji statistik Koefisien Korelasi Rank Kendall untuk menguji hipotesis minor dan Koefisien Konkordasi Kendall untuk menguji hipotesis mayor.

Analisis Korelasi Rank Kendall antara Variabel Sikap (X_1) terhadap Implementasi Kebijakan PBB (Y)

Dalam analisis ini menggunakan perhitungan program SPSS sehingga dapat di hasilkan $\tau = 0.598$, artinya bahwa hubungan yang dimiliki oleh sikap dengan implementasi kebijakan PBB positif dan hasil perhitungan Koefisien Korelasi Rank Kendall tersebut yang kemudian di uji signifikasinya dengan menggunakan uji Z (Sidney Siegel; 1992) maka nilai $Z = 4,892$

Harga Z kemudian di konsultasikan dengan harga Z tabel dengan taraf signifikan 1%. Harga Z tabel pada taraf signifikan 1% menunjukkan angka 2,58 sehingga Z hitung lebih besar dari Z tabel pada taraf signifikan 1% yaitu $4,89 > 2,58$.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan uji statistik, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif anatar variabel sikap terhadap variabel implementasi kebijakan **dapat diterima**.

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan sikap (X1) terhadap implementasi kebijakan (Y) digunakan rumus seperti di bawah ini :

$$\begin{aligned}KD &= \tau^2 \cdot 100\% \\ &= (0,598)^2 \times 100\% \\ &= 0,3576 \times 100\% \\ &= 35,76 \%\end{aligned}$$

Sesuai hasil perhitungan Koefisien Determinasi (KD) tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai KD yang diperoleh menunjukkan bahwa pada variabel implementasi kebijakan (Y) terjadi perubahan sebesar 35,76% yang disebabkan oleh variabel sikap (X1), sedangkan sisanya sebesar 64,24% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Analisis Korelasi antara Variabel Komunikasi (X₂) terhadap variabel Implementasi kebijakan PBB (Y)

Dalam analisis ini menggunakan perhitungan program SPSS sehingga dapat di hasilkan $\tau_{X_2.Y} = 0.371$, artinya bahwa pengaruh yang dimiliki oleh komunikasi dengan implementasi kebijakan adalah positif dan hasil perhitungan koefisien korelasi rank kendall tersebut kemudian di uji signifikasinya dengan menggunakan uji Z

Harga Z kemudian dikonsultasikan dengan harga Z tabel dengan taraf signifikan 1%. Harga Z pada taraf taraf signifikan 1% menunjukkan angka 2,58 sehingga Z hitung lebih besar dari Z tabel pada taraf signifikan 1% yaitu :

$$\text{Taraf signifikansi 1\% : } Z \text{ hitung} > Z \text{ tabel} \text{ atau } 3,03 > 2,58$$

Sesuai dengan ketentuan dalam uji statistik dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara komunikasi dengan implementasi kebijakan **diterima**, Selanjutnya untuk mengetahui hubungan komunikasi (X2) terhadap implementasi kebijakan (Y) digunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 KD &= \tau^2 \cdot 100\% \\
 &= (0,371)^2 \times 100\% \\
 &= 0,1376 \times 100\% \\
 &= 13,76\%
 \end{aligned}$$

Pada hasil perhitungan Koefisien Determinasi (KD) tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai KD yang diperoleh menunjukkan bahwa pada variabel implementasi kebijakan terjadi perubahan sebesar 13,76% yang disebabkan oleh variabel komunikasi (X2), sedangkan sisanya sebesar 86,23% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Hubungan antara Variabel sikap (X₁) dan komunikasi (X₂) terhadap implementasi kebijakan PBB (Y)

Uji Konkordasi Kendall Antara Sikap (X₁) dan Komunikasi (X₂) Terhadap Implementasi Kebijakan (Y)

Test Statistics

N	33
Kendall's W ^a	,893
Chi-Square	58,970
df	2
Asymp. Sig.	,000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Analisis dengan perhitungan program SPSS diketahui bahwa $W = 0,893$ sebagai koefisien konkordasi kendall. Untuk uji signifikansi W pada sampel ($N > 1$) dapat digunakan nilai χ melalui rumus Chi Kuadrat sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 x^2 &= K(N - 1).W \\
 x^2 &= 3(33 - 1)0,893 = 3.32.0,893 = 85,72
 \end{aligned}$$

Kemudian harga χ^2 dikonsultasikan dengan harga kritik Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan $db = N - 1$, yaitu $33 - 1$. Pada taraf signifikansi 5%. Harga kritis tabel

pada taraf signifikansi 5% menunjukkan angka 55,75. Dari hasil konsultasi tersebut diketahui bahwa nilai hitung $\chi^2 > \chi^2$ tabel pada taraf signifikansi 5%, yaitu :

$$\text{Taraf signifikansi 5\% : } \chi^2 \text{ hitung} > \chi^2 \text{ tabel atau } 85,72 > 55,75$$

Sesuai analisis data diatas, maka hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel sikap dan variabel komunikasi terhadap variabel implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat **dapat diterima**.

Besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y dapat diketahui melalui rumus Koefisien Determinasi (KD) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= W^2 \times 100 \% \\ &= 0,893^2 \times 100 \% \\ &= 0,7974 \times 100 \% \\ &= 79,74 \% \end{aligned}$$

Sesuai perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berubah sebesar 79,74 % sebagai akibat adanya hubungan dengan variabel sikap dan komunikasi serta pengaruh variabel lainnya sebesar 20,26 %.

Oleh karena itu maka hipotesis yang dikemukakan sebelumnya pada kerangka dasar pemikiran yang menyatakan bahwa variabel sikap (X1) dan variabel komunikasi (X2) merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan (Y) dapat **diterima**. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian hipotesis dalam bentuk analisis tabel silang, Koefisien Korelasi Rank Kendall, Koefisien Konkordasi Kendall, dan Koefisien Determinan dimana **hipotesis dapat diterima secara signifikan**.

Penutup

Kesimpulan

Sesuai data yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, antara lain :

1. Kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Gisikdrono Semarang Barat tergolong tinggi. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan antara lain sikap wajib pajak yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini disebabkan karena beberapa masyarakat merasa pemungutan PBB belum memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi keberatan untuk membayarkan sejumlah uang kepada Negara tanpa ada manfaat yang dirasakan.
2. Hasil rekapitulasi variabel sikap petugas pelaksana pemungutan PBB diketahui bahwa sikap para petugas pelaksana pemungutan PBB di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat masih dikategorikan rendah, sehingga masih perlu banyak mendapat pembenahan. Adapun penyebab buruknya sikap petugas pelaksana pemungutan disebabkan oleh ketidakdisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya. Sikap petugas yang sering datang terlambat ke kantor dan bahkan pulang terlebih dulu sebelum jam kantor selesai merupakan salah satu bentuk ketidakdisiplinan petugas PBB.
3. Kesimpulannya bahwa komunikasi yang dilakukan petugas pelaksana pemungutan PBB di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat dikatakan sudah sangat tinggi, walaupun demikian masih ada juga kekurangan-kekurangan yang dialami, antara lain Kejelasan informasi pelayanan yang dirasakan kurang jelas diketahui oleh masyarakat. Hal ini di karenakan kurangnya intensitas penyuluhan mengenai

PBB sehingga masyarakat menjadi kurang paham tentang pentingnya kebijakan PBB. Komunikasi yang dilakukan masih bersifat kaku, para responden menganggap ada beberapa petugas hanya memberikan informasi seperlunya saja tanpa memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai PBB.

Setelah dilakukan penghitungan dengan rumus statistik Koefisien Korelasi Rank Kendall dan Koefisien Konkordansi Kendall, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Ada hubungan yang signifikan antara variabel sikap dengan implementasi kebijakan yang dibuktikan dari hasil $\tau = 0,598$ dan $Z = 4,89$, ternyata dengan uji signifikansi 1% harga Z hitung 4,89 lebih besar daripada harga Z tabel pada taraf signifikan 1%. Dengan demikian **hipotesis dapat diterima**. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara sikap terhadap implementasi kebijakan digunakan rumus koefisien determinasi menghasilkan $KD = 35,76\%$. Ini menunjukkan sikap berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebesar 35,76% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
2. Ada hubungan yang signifikan antara variabel komunikasi dengan implementasi kebijakan yang dibuktikan dari hasil $\tau = 0,371$ dan $Z = 3,03$, ternyata dengan uji signifikansi 1% harga Z hitung 3,03 lebih besar daripada harga Z tabel pada taraf signifikan 1%. Dengan demikian **hipotesis dapat diterima**. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara komunikasi terhadap implementasi kebijakan digunakan rumus koefisien determinasi menghasilkan $KD = 13,76\%$. Ini menunjukkan komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebesar 13,76% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Ada hubungan yang signifikan antara sikap dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan yang dibuktikan dari hasil Koefisien Konkordansi Kendall (W) yang menunjukkan angka W sebesar 0,893 dan uji signifikansi χ^2 menghasilkan

nilai χ^2 sebesar 85,72. Kemudian ini dikonsultasikan dengan χ^2 tabel dengan taraf signifikan 5% = 55,75 menunjukkan bahwa χ^2 observasi = 85,72 > χ^2 tabel 5% = 55,75 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis dapat diterima**.

4. Besarnya pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y dapat diketahui melalui rumus Koefisien Determinasi (KD) yakni sebesar 79,74%. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berubah sebesar 79,74% sebagai akibat adanya pengaruh dari sikap dan komunikasi serta pengaruh variabel lainnya sebesar 20,26 %.

Saran-saran

Sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, berikut ini penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Menyukseskan implementasi kebijakan PBB, dengan cara petugas pelaksana diharapkan lebih dapat memahami dan mau memberikan pelayanan yang baik, Selain itu petugas harus lebih disiplin dalam melakukan tugasnya.
2. Membudayakan iklim kerja yang kompetitif, orientasinya agar petugas terstimulasi potensi dan kapabilitasnya. Dengan iklim yang kompetitif, maka petugas akan dapat menunjukkan performa yang prima. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan pada petugas berprestasi dan sebagainya.
3. Memberikan penghargaan misalnya berupa undian berhadiah kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu dengan tujuan agar kesadaran wajib pajak dapat meningkat sehingga nantinya semua wajib pajak membayar tepat waktu.

4. Melakukan sosialisasi kebijakan. Dimulai dengan menempelkan spanduk, membagikan pamflet tentang pentingnya membayar PBB tepat waktu di tempat strategis sampai dengan memberikan penyuluhan. Selain itu, menindaklanjuti dari hasil penyuluhan yang dilakukan seperti pihak yang mengikuti penyuluhan diharuskan menyebarluaskan informasi yang diperoleh dan sebagainya.

Saran-saran atau rekomendasi diatas diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan kebijakan PBB di Kelurahan Gisikdrono Semarang Barat terlaksana dengan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, *Aspek-Aspek Perilaku*, Erlangga, Jakarta, 1998.
- Davis, Keith dan Newstrom John W, *Perilaku Dalam Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Dwijowijoto, Nugroho Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2004
- Dulgani, *Skripsi fisip, Unpublished*, Semarang, 2006
- Gibson, Ivancevica, Donnely, *Organisasi dan Manajemen : Peilaku Struktur Proses*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Indrawijaya, Adam, *Perilaku Organisasi*, Sinar Bandung, Jakarta, 1989.
- Islamy, Irfan, *Kebijakan Publik*, Karunika, Jakarta, 1992.
- , *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1983.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit : ANDI, Yogyakarta, 2003.

Purnaweni, Hartuti, *Kebijakan Publik*, FISIP-Undip, Semarang, 1991.

Singarimbun, Masri dan Effendi Sofyan, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia Jilid II*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Monografi Kelurahan Gisikdrono 2006.